

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang penelitian**

Isu perihal lingkungan global ialah sebuah ancaman bersama kepada negara-negara secara mengglobal, perseorangan, ataupun Non Governmental Organisation (NGOs). Diskusi perihal faktor-faktor berlangsungnya perubahan iklim (*climate change*), pemanasan global (*global warming*), rusaknya hutan, menipisnya lapisan ozon sudah jadi agenda krusial dari politik lingkungan global. Selaku prioritas krusial perihal terminimalisirnya sumber daya alam sebab eksistensi faktor produksi yang sifatnya bertendensi eksploitatif serta masif destruktif. Maka dari dalam pengelolaannya memunculkan isu terkait alam beserta sumberdayanya, semisal *illegal logging*, konversi lahan kepada hutan-hutan lindung, serta kebakaran hutan ialah ssekumpulan ancaman yang serius. Indonesia sebagai negara yang mempunyai hutan yang begitu ekspansif serta beragam beranggapan bahwasanya perihal terkait ialah satu tantangan guna membereskan isu deforestasi serta degradasi hutan selaku bentuk penanganan emisi serta perubahan iklim. Berdasar kepada data “*Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*” dipaparkan bahwasanya kebanyakan isu gas emisi di Indonesia datangnya dari deforestasi yakni 60% CO<sub>2</sub> pada skala global deforestasi menempati ranking ketiga penyumbang gas emisisebesar 17%, diikuti sektor industri 19%, rangking teratas diduduki oleh sektor energi serta transportasi dimana kontribusinya ialah 26%.

Sejak tahun 1970-an, telah terjadi perubahan besar tutupan hutan di Indonesia. Perubahan ini disebabkan oleh deforestasi yang terjadi dalam beberapa

siklus gelombang. Dari tahun 1970-an sampai 1990-an, laju deforestasi tercatat sekitar 61,2 juta hektar/tahun. Antara 1989 sampai 2005 melonjak jadi 1,99 juta hektar/tahunnya. Berdasar kepada data deforestasi tahun 2003-2006 yang dirilis oleh Departemen Kehutanan, laju deforestasi Indonesia ialah hingga 1,17 juta hektar/tahun. (rahayu, 2012)

Data kondisi hutan global yang dirilis oleh *The UN Food & Agriculture Organization* (FAO), pada tahun 2007, laju deforestasi Indonesia ialah 1,8 juta hektar pertahunnya kurun tahun 2000-2005. Laju deforestasi Indonesia telah memimpin *Guinness Book of Records* untuk memberikan Indonesia "gelar terhormat" sebagai negara dengan deforestasi tercepat di dunia. (purwaningsih, 2008)

Kementerian Kehutanan juga merilis data pada tahun 2011, mengindikasikan bahwasanya sekitar 1,2 juta hutan Indonesia, yang hampir lima kali luas Singapura hilang setiap tahun. Menurut sebuah studi yang diketuai Matt Hansen dari University of Maryland, hilangnya 15,8 juta hektar Indonesia kurun tahun 2000 serta 2012, hutan Indonesia menempati rangking 5 setelah Rusia, Brasil, Amerika Serikat serta Kanada terkait kehilangan hutan (Sedayu, 2014)

Ekosistem hutan Jawa Barat saat ini rentan terhadap deforestasi di kawasan hutan. Akibatnya, ancaman-ancaman tersebut berupa buruknya kinerja dan fungsi hutan, yang membebani kehidupan masyarakat adat secara ekologi, ekonomi, sosial bahkan sejarah pada kehidupan masyarakat adat. Situasi ini diperparah Ketika hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja diperkenalkan, yang memberi peluang bisnis

dan politisi untuk mendampaki proses pengambilan keputusan untuk izin hutan di Jawa Barat.

Peraturan Presiden No. 16 tahun 2015 menetapkan kombinasi Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dewan Nasional Perubahan Iklim serta Badan Pengelola REDD+ pada Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan yang dioperasikan secara lanjutan lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan No. 18 tahun 2015.

Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan lewat Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim ditugaskan guna menjalankan rumusan serta penyelenggaraan kebijakan pada aspek pengontrolan perubahan iklim guna memmanifestasikan komitmen Indonesia guna meminimalisir emisi baik pada tingkatan nasional ataupun internasional. Pengontrolan perubahan iklim di Indonesia butuh aktivitas nasional serta internasional yang sifatnya iterative serta sinergi. Pengimplementasian kesepakatan pada tingkatan global membutuhkan penginterpretasi pada paradigma pembangunan nasional, tergolong kepadanya penginterpretasi ratifikasi Perjanjian Paris serta NDC lewat aksi Mitigasi pada paradigma nasional ditujukan guna menyokong pembangunan yang persisten serta memfokuskan acuan minim emisi serta resilien terkait perubahan iklim. Efektivitas pengontrolan perubahan iklim pula begitu tergantung kepada kebijakan serta pengimplementasiannya pada keseluruhan tingkatan (internasional, regional, nasional, serta subnasional).

Organisasi Dunia turut menangani deforestasi hutan di Indonesia, satu diantara sejumlahnya UNEP, organisasi ini ialah suara teruntuk lingkungan pada

sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tingkatan global serta regional, mempunyai mandat guna mengoordinasikan ekspansi konsensi kebijakan lingkungan dengan menjagakan lingkungan global yang tengah dikaji serta memaparkan perkara yang tampak serta mengambil atensi pemerintahan beserta masyarakat internasional selaku pertimbangan serta tindakan. Isu lingkungan yang dilaksanakan oleh UNEP satu diantaranya ialah usaha guna meminimalisir emisi karbon pula perkara deforestasi hutan global. Sebab maksimalnya sumbangan degradasi hutan serta deforestasi kepada besaran emisi gas rumah kaca. (Kumesan, Bonny alfred, 2013)

Negara-negara pemilik tutupan hutan berpotensi guna menjalankan peranan aktif menolak eksistensi emisi gas rumah kaca lewat aktivitas pelestarian hutan serta area lahan gambut yang diperkaya karbon, hingga dibutuhkan *approach* terbaru serta terefektif yakni lewat REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation dan Forest Degradation*). Mekanisme REDD+ ditetapkan selaku alternatif yang mencanangkan paradigma terbaru perihal usaha konservasi hutan lewat eksistensi insentif ekonomi terkait besaran karbon yang bisa dijagakan selaras dengan kelestarian satu kawasan hutan ataupun lahan gambut. Indonesia ialah satu diantara sejumlah negara berkembang dengan luasnya hutan hujan tropis termaksimal ketiga di dunia serta pula begitu berpeluang guna berperanan terkait absorpsi emisi karbon dunia. Perihal terkait tak dibarengi dengan pengelolaan hutan yang bagus, menjadikan luas hutan Indonesia makin terminimalisir sebab deforestasi. (Kumesan, Bonny alfred, 2013)

Melihat berbagai ancaman tersebut maka mendorong UNEP guna bekerjasama dengan pemerintah Indonesia guna membereskan permasalahan perihal deforestasi di Indonesia menjadikan hutan Indonesia mampu melaksanakan fungsinya guna mengabsorpsi emisi karbon secara optimal. Guna menolong perihal penyelesaian perkara deforestasi di Indonesia, UNEP berperan terkait penanganan masalah deforestasi di Indonesia melalui program pembangunan berkelanjutan. . (Kumesan, Bonny alfred, 2013)

Konsep pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang menjadikan seimbangya kecukupan urgensi manusia dengan sistem perlindungan lingkungan alam,menjadikan urgensi terkait mampu dicukupkan tak sekadar sekarangg tapi pula pada kurun waktu yang tak dibatasi dengan tiada meminimalisir abilitas generasi periode mendatang guna mencukupkan urgensinya (*development that meets the urgencies of the present with no compromising the ability of future generations to meet their own needs*). Supaya pembangunan mampu persisten, makanya pembangunan yang dicanangkan mesti ramah lingkungan (*economically viable*), serta diterima secara sosial (*socially acceptable*). (Angie, 2021)

Pada paradigma pembangunan berkelanjutan, kebijakan yang memungkin mampu berlangsung diantara kebutuhan mengkaji SDA guna melawan kemiskinan serta kebutuhan menolak berlangsungnya degradasi lingkungan mesti dihindari pula sejauh mungkin mampu terlaksana secara berimbangan. Pembangunan berkelanjutan pula mewajibkan dipenuhinya urgensi fundamen teruntuk masyarakat serta eksistensi peluang yang ekspansif teruntuk masyarakat guna

mendapatkan cita-citanya terkait kehidupan yang lebih baik dengan tiada mengorbankan generasi mendatang ( Sutamihardja ,2004)

Krisis lingkungan global membuat para peneliti HI sedang merekonstruksi teori yang mampu dipergunakan oleh negara-negara global guna keluar dari permasalahan lingkungan serta mencegahnya terulang kembali. Di antara sekumpulan teori lingkungan, penulis berkeinginan guna mengidentifikasi *Green Political Theory* (GPT). Menurut Patterson, tujuan *Green Political Theory* (GPT) pada HI ialah guna menyajikan pemaparan terkait permasalahan ekologi yang dihadapi manusia, serta langkah terkait krisis dengan menetapkan lingkungan selaku faktor yang mesti dijagakan keseimbangannya. GPT pula eksis guna menyajikan landasan normatif terutuk pertanyaan-pertanyaan yang membahas krisis ekologis. (Patterson,Matthew, 2005)

Jawa ialah pulau dengan luas 138.793 km<sup>2</sup>, berpenduduk diatas 160 juta orang. Pulau dengan daerah paling padat di Indonesia. Akibatnya, luas hutan berkurang sebab pertumbuhan penduduk. Berdasar kepada data deforestasi kurun tahun 2003-2006, Jawa melepas setidaknya 2.500 hektar hutan setiap tahunnya. Sementara itu, dengan perhitungan yang sama, diperkirakan Pulau Jawa kehilangan 10.000 hektar hutan antara tahun 2007-2010, penggundulan hutan di pulau Jawa pula berefek pada keselamatan masyarakat. Misalkan, risiko terkena bencana alam, semisal banjir serta tanah longsor. (Hance, 2010)

Berdasar kepada data dari Kementerian Kehutanan, mayoritas kawasan hutan Jawa barat sudah berpindah fungsinya selaku kondisi hutan primer ke sekunder. Hutan dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, akan tetapi keadaan hutan

di Jawa Barat telah berkurang setidaknya 30% dari hutan primer serta 26% di hutan sekunder. Dari jumlah terkait, mayoritas hutan dipergunakan teruntuk pembangunan, yakni hingga 18.000 hektar pertahunnya. Berdasar kepada data terakhir “Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS)” serta hutan lindung tahun 2016, luasnya hutan Jawa yang tersisa ialah tak lebih dari 698.368 hektar. (Iqbal, Hutan Jawa Rusak: Bukan Hanya Manusia Merugi, Satwa juga Menderita, 2019)

Populasi provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama di Indonesia Berdasar kepada data dari Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan & Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku data acuan penyelenggaraan SP2018, telah terjadi peningkatan populasi di Jawa Barat dengan Jumlah penduduk bertambah 5,2 juta jiwa dalam rentang waktu delapan tahun terakhir (2010 - 2018) dengan jumlah total mencapai 48.683.861 jiwa, peningkatan populasi penduduk ini tentunya berdampak ekspansi terhadap kawasan hutan lindung. ([Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat](#))

Kawasan hutan lindung dicurigai bukan lagi hutan belantara, akan tetapi telah diubah jadi lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman. Akibatnya, di Jawa Barat, banjir dan tanah longsor meningkat hingga 130 dan 113 kejadian bencana banjir serta longsor pada 2018 dibanding 2017. Selain curah hujan yang tinggi, perihal terkait pula dikarenakan oleh rusaknya area hilir sungai, lahan kritis, pengalihfungsian lahan, serta berkurangnya tutupan hutan. (Nurbaya, 2020)

Berdasar kepada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah berlangsung peristiwa bencana alam sebanyak 1.039 jumlah ini tercatat dalam kurun waktu bulan Januari hingga Agustus pada tahun 2020 yang berdampak terhadap 768.319 jiwa, luas hutan wilayah provinsi Jawa Barat menurut Dinas kehutanan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.195/Kpts-II/2003 berluaskan 816.603 hektar ataupun 22,01% dari total luasnya wilayah yakni 3.709.528 , Data terakhir tercatat oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kawasan hutan kritis di Jawa Barat ialah hingga 911.192 hektar , Spesifiknya luas lahan kritis diluar area konservasi mencapai 727.309 sedangkan pada kawasan hutan lindung mencapai 183.883 hektar, Dari jumlah tersebut terbagi jadi 2 bagian yakni lahan pribadi dan lahan negara, Luasnya lahan kritis memberikan tekanan terhadap lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana alam, Berdasar kepada data Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) pada 2020 sudah terjadi bencana alam pada area Jawa Barat sebesar 1.039 kejadian yang berdampak pada 768.318 jiwa. (Iqbal, Kondisi Hutan Jawa Bagian Barat Kini, dan Bandingan Masa Lalu Zaman Junghuhn, 2020)

Peningkatan laju deforestasi selain menerpa area hutan produksi hingga merambah terhadap area hutan lindung yang ialah area konservasi sebagai taman nasional, Seperti kebijakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) provinsi Jawa Barat yang menetapkan lahan berluaskan 306,519 di Garut selaku kawasan konservasi dikarenakan 80% wilayahnya ialah area hutan lindung, Dengan menjalankan evaluasi efektivitas kebijakan terhadap lingkungan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat hal ini mampu mengurangi berlangsungnya

bencana alam semisal longsor serta banjir bandang pada daerah Garut, Bogor, Cianjur, Bandung, yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. (Iqbal, Kondisi Hutan Jawa Bagian Barat Kini, dan Bandingan Masa Lalu Zaman Junghuhn, 2020), Makanya penulis tertarik dalam menganalisis perihal **“KONTRIBUSI UNEP (*United Nations Environment Programme*) DALAM UPAYA MENANGANI DEFORESTASI DI JAWA BARAT.”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah pada studi, yakni:

1. Bagaimana keberadaan UNEP dalam menangani masalah lingkungan di Jawa Barat ?
2. Bagaimana kondisi deforestasi di Jawa Barat ?
3. Bagaimana pengaruh UNEP dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi deforestasi yang terjadi di Jawa Barat ?

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan dan kompleksnya permasalahan yang akan di bahas, maka penulis akan membatasi fokus pembahasan mengenai pengaruh eksistensi UNEP dalam membantu pemerintah dalam menangani deforetasi yang terjadi di Jawa Barat akibat ledakan penduduk dalam kurun waktu 2011-2021

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasar kepada permasalahan yang melatar belakanginya serta identifikasi masalah yang sudah paparkan terdahulu, rumusan masalah pada studi ini ialah: **“Bagaimana kontribusi UNEP dalam upaya menangani deforestasi di Jawa Barat.”**

### **1.5. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

a) Tujuan Penelitian

Studi berikut mempunyai sejumlah tujuan, diantaranya ialah:

1. Untuk mengetahui alasan dan latar belakang UNEP dalam upaya menangani deforestasi di Jawa Barat terkait aktivitas ekspansi pembangunan alih fungsi lahan
2. Untuk mengetahui kontribusi UNEP dalam upaya menangani deforestasi di Jawa Barat terkait aktivitas ekspansi peningkatan penduduk
3. Untuk mengetahui peranan dari pemerintah dan masyarakat di Jawa Barat yang berdampak ekspansi terhadap hutan” lindung

b) Kegunaan Penelitian

Berikut ialah kegunaan dari studi ini:

1. Guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan menempuh program S-1 pada program studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan;
2. Penelitian diharap mampu ditetapkan selaku sumber informasi baik teruntuk penulis ataupun pembaca selaku mahasiswa Hubungan Internasional ataupun masyarakat umum.